

PROSIDING

# SEMINAR NASIONAL AGRIBISNIS MANGGA



Kerjasama  
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR  
dengan  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG



ISBN 978-979-3450-11-7

# PROSIDING

**SEMINAR NASIONAL AGRIBISNIS MANGGA**

**Probolinggo, 10-11 Nopember 2006**

**Penyunting:**

Ketua : Dr. Sudarmadi Purnomo  
Anggota : Prof. Dr. Sumeru Ashari  
Dr. Suhardjo  
Ir. Yuniarti, MS  
Ir. Pudji Santoso, MS  
Dr. Q. Dadang Ernawanto  
Dr. Dawam Maghfoer

**Penyunting Pelaksana :**

Kuntoro Boga Andri, Dr  
Dra. Endang Widajati  
Prayitno Surip



Kerjasama :  
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR**  
dengan  
**FAKULTAS PERTANIAN – UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Malang , 2007



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL AGRIBISNIS MANGGA**

**Penyunting**

**Ketua** : Dr. Sudarmadi Purnomo

**Anggota** :  
Prof. Sumeru Ashari  
Dr. Suhardjo  
Ir. Yuniarti, MS  
Ir. Pudji Santoso, MS  
Dr. Q. Dadang Ernawanto  
Dr. Dawam Maghfoer

**Penyunting Pelaksana** :  
Kuntoro Boga Andri, Dr  
Dra. Endang Widajati  
Prayitno Surip

**Diterbitkan oleh** : BPTP Jawa Timur

**ISBN** : ISBN 978-979-3450-11-7

Penerbitan buku ini dibiayai dari:  
DIPA BPTP JAWA TIMUR TA. 2007

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
<b>MAKALAH UTAMA</b>	
PERKECAMBAHAN EMBRIO MANGGA SECARA IN VITRO DENGAN PENAMBAHAN SUKROSA DAN BENZIL AMINO PURIN	1
<i>Syarif Husen</i>	
KAJIAN SUMBER EMBRIO POLIEMBRIONI BATANG BAWAH DAN STADIA TUMBUH ENTRES TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT MANGGA SAMBUNGAN	10
<i>Ramdan Hidayat</i>	
HASIL-HASIL PENELITIAN TENTANG TEKNOLOGI PEMBIBITAN MANGGA	22
<i>Titiek Purbiati</i>	
PENGAJIAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS MANGGA PODANG URANG	41
<i>Suhardjo, Gatot Kartono, Sri Yuniastuti, Kasmiati, Al. Budijono, Pudji Santoso, Sri Harwanti dan Baswarsati</i>	
PENINGKATAN MUTU BUAH MANGGA ARUMANIS UNTUK PASAR SWALAYAN	52
<i>Yuniarti, Paulina Evy R. Prahardini dan Pudji Santoso</i>	
RANTAI PASOKAN DAN DISTRIBUSI MANGGA DI JAWA TIMUR	63
<i>Pudji Santoso</i>	
PEMBUAHAN MANGGA DI LUAR MUSIM PADA SENTRA PRODUKSI MANGGA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT	72
<i>P.E.R Prahardini dan Muji Rahayu</i>	
UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN PETANI DALAM TEKNOLOGI PENGOLAHAN BUAH MANGGA DI KECAMATAN SAMBONG, KABUPATEN BLORA	80
<i>Dwi Nugraheni, Sri Catur, BS dan Dede Juanda, JS</i>	
PROFIL DAN KIAT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MANGGA DI JAWA TIMUR	88
<i>Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur</i>	
INFORMASI UMUM DAN SPESIFIKASI PRODUK PT. TRIGATRA RAJASA	99
TEKNOLOGI PENANGANAN PASCAPANEN MANGGA	106
<i>Wisnu Broto dan Ridwan Rachmat</i>	
SEBUAH KAJIAN MENGENAI HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI MANGGA KERING BERBASIS PEDESAAN	116
<i>Charles F. Nicholson, Ph. D, Oswald Marbun, PhD, dan Dian Histifarina, MSi</i>	

MENDORONG EKSPOR, MENGURANGI KEMISKINAN PERANAN KONTRAK DI INDUSTRI MANGGA	146
<i>Charles F. Nicholson, Ph.D.</i>	
PENGARUH BEBERAPA ZAT PENGATUR TUMBUH PAKLOBUTRAZOL TERHADAP PRODUKSI MANGGA ARUMANIS	162
<i>L. Rosmahani dan D. Rachmawati</i>	
REVIEW HASIL-HASIL PENELITIAN/PENGAJIAN MANGGA DI INDONESIA	169
<i>Sudarmadi Purnomo dan Yuniarti</i>	
<b>MAKALAH POSTER</b>	
PENGAJIAN MODEL AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN-TERNAK SAPI DI LAHAN SAWAH TADAH HUJAN	191
<i>Zainal Arifin, M. Ali Yusron, M. Soleh, Kasmiati, M. Ismail Wahab, dan Endang P.K</i>	
PENGAJIAN MODEL SISTEM INTEGRASI USAHATANI PADI DAN SAPI POTONG DI LAHAN SAWAH	206
<i>F. Kasijadi, Soewono, Ali Yusran, Wahyunindyawati, Kasmiyati, Al Budiono</i>	
INVENTARISASI DAN KARAKTERISASI SUMBERDAYA LAHAN DI KABUPATEN SUMENEP	224
<i>Z. Arifin dan D.P. Saraswati</i>	
PENGARUH PEMBERIAN PUPUK NK MAJEMUK "KALON" TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI SAWAH	237
<i>E.P Kusumainderawati, F.Kasijadi, A b u dan Sunaryo</i>	
PENGARUH PUPUK NK MAJEMUK "CHALLON" TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI SAWAH	247
<i>E.P. Kusumainderawati, F Kasijadi, A b u, dan Sunaryo</i>	
PENGARUH PEMBERIAN PUPUK CAIR "MULTIMICRO" TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH	259
<i>E.P. Kusumainderawati, F. Kasijadi dan Abu</i>	
PENGELOLAAN PADI LOKAL	268
<i>Wigati Istuti, Bambang Pikukuh, Soekarno Roesmarkam, S. Yuniastuti, Fatkul Arifin, Ono Sutrisno, Sri Zunaini dan Robi'in</i>	
PENGAJIAN MODEL AGRIBISNIS BERBASIS JERUK KEPROK SIEM DAN PULUNG SPESIFIK LOKASI	281
<i>M. Sugiyarto., Q D. Ernawanto, Endah R, Suhardi, Gatot Kartono, F.Kasijdi. Titik Purbiati, Harwanto, dan Tajib</i>	
ADAPTASI CALON VARIETAS MELON HASIL PERSILANGAN 3 GALUR MELON	292
<i>M. Sugiyarto, B. Tegopati, Baswarsiati, Sarwono dan Martono</i>	

PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN MODEL USAHATANI TERPADU PADI – UDANG WINDU DI SAWAH TAMBAK DI JAWA TIMUR BAGIAN TIMUR <i>Al. Gamal Pratomo, F. Kasijadi, Anang Muhariyanto, Thohir Zubaidi, Yuli Astuti, dan Diatri Krisunari</i>	302
RESPON PENGGUNAAN PUPUK DAUN “WUXAL ZINC” TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI PADI <i>Al. Gamal Pratomo dan F. Kasijadi</i>	307
UJI ADAPTASI GALUR-GALUR HARAPAN CALON VARIETAS UNGGUL TOMAT LAHAN SAWAH DATARAN RENDAH DI JAWA TIMUR <i>Dwi Setyorini, Baswarsiati, Suhardi, Diding Rahmawati dan Indriana RD.</i>	317
PENGAJIAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS PISANG MAS DAN AGUNG <i>Wahyunindyawati, F. Kasijadi, Suhardi, Purwanto, PER Prahardini, Ita Yustina dan Darminto</i>	327
PENGAJIAN DIVERSIFIKASI TIWUL UBI KAYU UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI <i>Yuniarti, Suhardi dan Pudji Santoso</i>	345
PENGARUH BAHAN KIMIA METOMINOSTROBIN 200 EC TERHADAP PENYAKIT EMBUN TEPUNG <i>Podosphaera leucotricha</i> DAN PENYAKIT BECAK DAUN <i>Marsonia coronaria</i> PADA TANAMAN APEL <i>Sarwono, E. Korlina, D. Rachmawati dan Handoko</i>	359
PENGARUH DOSIS PERASAN DAUN SIRIH <i>Piper betle</i> TERHADAP PENYAKIT TEPUNG <i>Erysiphe polygoni</i> PADA TANAMAN KACANG PANJANG <i>Vigna sinensis</i> <i>Sarwono, Isye Haris Sulistiyani, E. Korlina</i>	365
STUDI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN CABAI KERING GILING PADA TINGKAT KELOMPOK TANI DI KABUPATEN TUBAN <i>Ruly Hardianto, Suhardjo, Suhardi dan Soni Kurniawan</i>	372
KAJIAN SISTEM USAHATANI INTENSIFIKASI DAN DIVERSIFIKASI KAMBING- KOPI-PISANG DI LOKASI PRIMA TANI KABUPATEN LUMAJANG <i>Ruly Hardianto, Harwanto dan Gatot Kartono</i>	388
STUDI TENTANG DAMPAK KEGIATAN PENAMBANGAN BATU KAPUR TERHADAP USAHA PETERNAKAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TUBAN <i>Ruly Hardianto</i>	406

PENGEMBANGAN SKIM PEMBIAYAAN UNTUK Mendukung USAHATANI  
INTEGRASI KAMBING-KOPI-PISANG DI LOKASI PRIMA TANI KABUPATEN  
LUMAJANG 415

*Ruly Hardianto dan Bambang Irianto*

PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)  
DALAM Mendukung PRIMA TANI DI JAWA TIMUR 427

*Bambang Irianto, Wigati Istuti, Thohir Zubaidi, Bambang Siswanto, Endah  
Retnaningtiyas dan Nugroho Pangarso*

DAMPAK PENGAJIAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN USAHATANI TERPADU  
PADI-TERNAK SAPI DI LAHAN IRIGASI 439  
KABUPATEN LUMAJANG

*Pudji Santoso, Ali Yusron, Purwanto dan M. Sairi*

## PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM MENDUKUNG PRIMA TANI DI JAWA TIMUR

*Bambang Irianto, Wigati Istuti, Thohir Zubaidi, Bambang Siswanto, Endah  
Retnaningtyas dan Nugroho Pangarso*

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur

### ABSTRAK

Kajian dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu komponen dalam Primatani di Propinsi Jawa Timur yang dimaksudkan untuk mendukung komponen-komponen kegiatan lainnya yaitu Introduksi di Lumajang dan Renovasi (Lanjutan) di Bojonegoro. Oleh karena itu, dalam kajian ini selain dilakukan dalam kerangka LKM juga sangat tergantung pada perkembangan kegiatan-kegiatan komponen lainnya di lokasi masing-masing. Pada tahun 2005, kegiatan ini bertujuan untuk: 1) mengkaji akses, persepsi dan kebutuhan petani terhadap skim-skim pembiayaan, 2) menganalisis mekanisme *delivery* dan aturan main skim-skim pembiayaan, 3) merumuskan skim pembiayaan yang *reasonable* bagi petani, dan 4) melakukan kaji-tindak (implementasi) skim pembiayaan mikro bagi petani. Melalui survey PRA yang dilakukan secara simultan dengan Tim Prima Tani Introduksi dan Lanjutan telah diperoleh gambaran tentang profil desa berikut kelembagaan petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya yang memiliki skim-skim pembiayaan atau kredit baik yang bersifat *on farm* maupun *off farm*. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kelembagaan petani dan masyarakat pedesaan di lokasi Prima Tani Lanjutan (Bojonegoro) secara umum lebih tertata dan aktif dibandingkan yang ada di lokasi Prima Tani Introduksi (Lumajang). Hal ini diduga berkaitan dengan intensitas implementasi program-program pembangunan (pemerintah) yang ada sebelumnya. Berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada dan persepsi masyarakat serta aspirasinya tentang skim pembiayaan yang diharapkan dan studi banding yang telah dilakukan, maka dibuat rancangan model LKM Prima Tani yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat/petani dan kemampuannya dalam mengelola skim kredit yang ditawarkan yaitu dengan pendekatan *Grameen Bank* yang pada mulanya hanya mengarah kepada kegiatan *off farm*. Untuk menampung aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan usahatani, maka skim khusus untuk usahatani juga akan dikembangkan sesuai kebutuhan di masing-masing lokasi Prima Tani.

**Kata kunci :** *Prima Tani, introduksi, lanjutan, skim pembiayaan/kredit, model LKM Prima Tani, Grameen Bank.*

### ABSTRACT

The assessment and development of microfinance institution is a component intended to support other East Java Prima Tani components (Introduced in Lumajang and Renovation in Bojonegoro). Therefore, principally, this microfinance assessment was also depended on the progress of other Prima Tani components in each site. In 2005, the purpose of the assessment were to: 1) explore the access,

perception and needs of farmers to the credit schemes, 2) analyze the delivery mechanism and rules of existing credit schemes, 3) formulate the reasonable credit schemes for farmers, and 4) implement the microfinance scheme for farmers. Some important information about the village profile along with its farmers and community institutions as well as the existing credit schemes, both on farm and off farm, were collected through a PRA survey conducted together with other Prima Tani teams. The results showed that farmers and community institutions in Bojonegoro's Prima Tani was generally better organized compared to they were in Lumajang, presumably related to the intensity of previous existing government development programs implemented in the region. Further, the Prima Tani Microfinance model was formulated based on the state of existing institutions, perceptions and aspirations of the community toward the expected credit scheme and also experience obtained during comparative study to the West Java microfinance institutions. Basically, the Prima Tani Microfinance was adopted from the Grameen Bank off farm microcredit. However, in order to accommodate the community needs of farming credit, a specific farm credit scheme were also developed in each Prima Tani region.

**Keywords :** *Prima Tani, introduction, renovation, credit scheme, Prima Tani Microfinance model, Grameen Bank.*

## PENDAHULUAN

Sejak diselenggarakannya *Microcredit Summit* pada tahun 1997 di Washington DC Amerika Serikat, peranan kredit mikro untuk penciptaan lapangan kerja mandiri guna mengurangi kemiskinan dan sekaligus memberdayakan masyarakat di pedesaan mulai berkembang luas (Syukur, 2003a; Syukur, 2004; Budiantoro, 2005). Pertemuan puncak tersebut antara lain telah mencanangkan target untuk menjangkau 100 juta penduduk miskin di dunia pada tahun 2005 yang didahului dengan sosialisasi dan kampanye secara besar-besaran di seluruh dunia. Bahkan, Bank Pembangunan Asia (ADB) juga mengakui bahwa keuangan mikro (*microfinance*) merupakan sarana yang ampuh untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memberdayakan masyarakat, mendorong pengembangan sumberdaya manusia dan memperbaiki status wanita (ADB, 1998 dalam Syukur, 2003a).

Sangat ironis bahwa petani di Indonesia justru merupakan kelompok masyarakat paling miskin yang hidupnya memprihatinkan dan tidak punya "power" apapun hampir di segala bidang kehidupan, sehingga apa yang telah mereka lakukan untuk bangsa ini sepertinya hanya sekedar tradisi saja dan dianggap sebagai hanya sekedar tugas mulia yang harus mereka kerjakan. Berbagai atribut terpasang di pundak petani, mulai dari kemampuan atau keahlian yang terbatas karena keterbatasan akses ke dunia pendidikan formal, rendahnya kemampuan menyerap atau mengadopsi teknologi sampai kepada label tidak bisa mengembalikan atau membayar kembali pinjaman modal yang diberikan (atau yang lebih tidak etis menyebutnya sebagai yang tidak bisa dipercaya). Harus ada program-program perbaikan nasib petani yang menurut terminologi *World Bank* termasuk kelompok miskin yang aktif ("*economically active poor*") yang berbeda dengan orang-orang yang benar-benar miskin dan tidak mampu berbuat apa-apa (Ismawan, 2003a dan

Kurniadi, 2002), sehingga bentuk bantuannya pun harus berbeda. Hasil survei BPS menyebutkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 telah berdampak pada peningkatan kemiskinan di Indonesia dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 24,2% pada tahun 1998 yang mendekati persentase kemiskinan tahun 1981. Bahkan, dengan menggunakan analisis indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan, krisis ekonomi telah memperluas, memperdalam dan memperparah kemiskinan di Indonesia.

Di Indonesia, usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui bantuan keuangan sebenarnya bukan hal yang baru. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan sejak 100 tahun yang lalu juga sudah mengarah seperti itu (Ismawan, 2003b). Pelayanan kredit untuk masyarakat pedesaan juga telah dirintis sejak masa penjajahan Belanda, yaitu melalui pendirian Bank Desa dan Lumbung Desa yang termasuk kelompok Bank Perkreditan Rakyat atau BPR (pertama kali didirikan di Purwokerto tahun 1895 dengan nama Bank Priyayi). Pada umumnya, pendirian BPR-BPR tersebut dimaksudkan terutama untuk mencegah cengkeraman pelepas uang (*rentenir*). Baru pada awal tahun enam puluhan mulai diluncurkan program-program perkreditan pertanian yang diawali oleh Program Bimas tahun 1965 (Thohari, 2003 dan Soentoro *et al.*, 1992) dan semakin berkembang atau diperbaiki sesuai kebutuhan dalam hal lembaga penyalurnya, prosedur, agunan dan sebagainya seperti Inmas (1977), KUT (1985-1999) dan KKP (2000). Namun, tampaknya implementasi program-program perkreditan tersebut masih belum sesuai dengan harapan yaitu peningkatan kesejahteraan petani. Bahkan, para pakar menyebutkan bahwa salah satu kegagalan Program KUT (Kredit Usaha Tani) disebabkan karena dana kredit tidak digunakan untuk usahatani tapi untuk usaha-usaha lainnya. Seharusnya juga mempertimbangkan pola pengelolaan keuangan petani atau masyarakat pedesaan yang unik dan khas, dimana pemenuhan kebutuhan lainnya itu sebenarnya dengan tujuan agar bisa melaksanakan kegiatan usahatani dengan baik. Sebagai contoh, jika kebutuhannya adalah untuk biaya pengobatan sang petani yang sedang tidak sehat, maka bantuan yang seperti itu tidak tepat tersebut sebenarnya akan membuat petani bisa bekerja lagi dengan baik atau bahkan lebih produktif.

Secara umum, alokasi kredit pertanian dalam 10 tahun terakhir hanya terealisasi kurang dari 10% (Syukur, 2003b). Hal tersebut memperlihatkan akses yang rendah bagi sebagian besar masyarakat pertanian terhadap lembaga keuangan formal pedesaan yang disebabkan karena adanya hambatan kelembagaan padahal akses terhadap kredit merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana hak-hak asasi lainnya. Sistem perbankan komersial konvensional yang ada selama ini dianggap tidak berpihak pada masyarakat golongan miskin. Hal ini karena mereka menerapkan prinsip 5-C (*Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition*) yang sangat sulit atau bahkan mustahil dipenuhi oleh masyarakat petani di pedesaan (Anonimus, 2003). Dengan gedungnya yang megah ber AC dan petugasnya yang berdasi itu saja bisa membuat petani enggan untuk masuk ke kantor Bank, belum lagi hal-hal yang bersifat formal dan jauh dari keseharian petani di pedesaan. Itu semua agaknya merupakan salah satu penyebab keterbatasan petani mengakses kredit-kredit formal.

## BAHAN DAN METODOLOGI PENGAJIAN

### a. Kerangka Pikir

Alur pikir pengkajian yang digunakan tersaji secara skematis pada Gambar 1. Pada sisi *input* akan dikaji : 1) pelaku usaha mikro, dalam hal ini petani (jenis usaha, modal, omset, pendapatan, agunan dll.), 2) lembaga-lembaga pembiayaan formal atau informal yang ada (kebijakan dasar, struktur, aturan main, mekanisme *delivery*, dll.), 3) relasi antara petani dengan lembaga pembiayaan (bentuk relasi, biaya transaksi, kinerja relasi, persepsi dan preferensi pelaku, permasalahan, dll.).

Hasil kajian tersebut, pada sisi *output*, akan berupa informasi mengenai : 1) struktur usaha, 2) kebutuhan pelayanan pembiayaan, 3) karakteristik lembaga pembiayaan (kelembagaannya, kekuatan dan kelemahannya, dll.). Selanjutnya, informasi mengenai struktur, keragaman dan perilaku pasar kredit ini akan menjadi landasan formulasi skim pembiayaan (LKM Prima Tani) yang akan diterapkan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan Prima Tani, maka pengembangan LKM dimaksudkan untuk membantu petani-petani dalam Prima Tani khususnya dalam hal penyediaan modal usaha. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai skim pembiayaan usahatani di kedua lokasi Prima Tani yang tampaknya berbeda. Sejauh informasi yang tersedia, di lokasi Prima Tani Lumajang belum pernah ada skim pembiayaan usahatani baik formal maupun non formal yang diinisiasi oleh pemerintah. Sebaliknya, di lokasi Prima Tani Bojonegoro sudah ada beberapa bentuk skim pembiayaan usahatani seperti KUM, P4K, KUT, KUAT dll. sehingga perlu dilakukan evaluasi *performance* skim-skim tersebut.

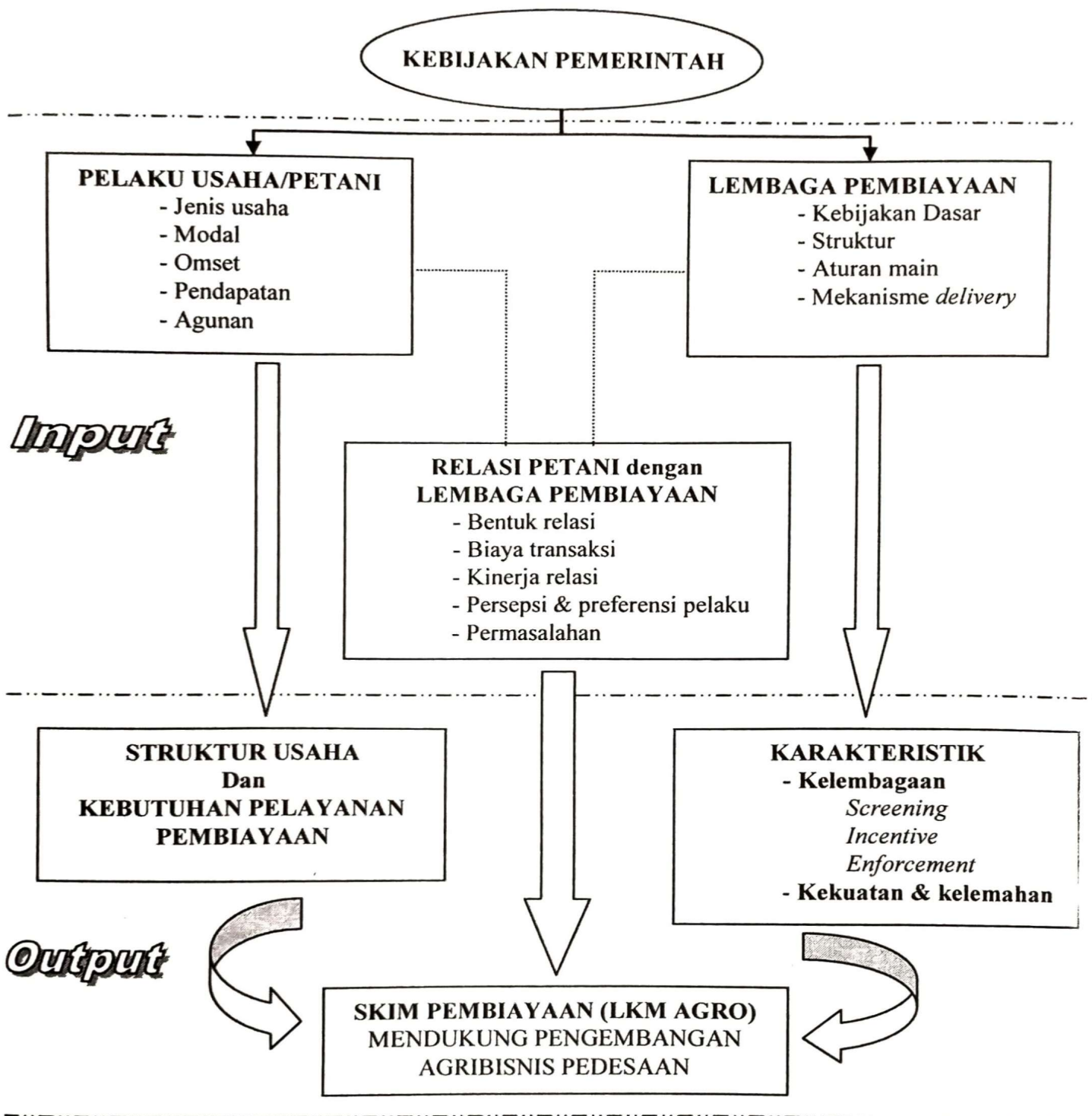
### b. Cakupan Kegiatan

Kegiatan pengkajian ini akan dilaksanakan di dua lokasi yang terkait dengan pelaksanaan pengkajian Prima Tani. Untuk kegiatan Prima Tani Introduksi akan dilaksanakan di Dusun Plambang, Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang yang mewakili wilayah pertanian di Lahan Kering Dataran Tinggi Iklim Kering (LKDTIK), sedangkan untuk kegiatan Prima Tani Lanjutan akan dilaksanakan di Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.

Untuk tahun pertama ini (2005) fokus utama kegiatan akan diarahkan untuk mendapatkan input dan menghasilkan output seperti yang tersirat pada alur pikir pengkajian (Gambar 1).

### c. Pengumpulan dan Analisis Data

Pada dasarnya, jenis data yang akan dikumpulkan dalam pengkajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani baik secara perorangan maupun kelompok dan tokoh-tokoh kunci menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) terstruktur dan pengamatan langsung terhadap kegiatan usahatani yang dilakukan responden. Selain itu, data primer juga bisa diperoleh dari lembaga-lembaga pembiayaan yang ada dan terkait dengan usahatani baik formal maupun non-formal untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme dan keragaan pembiayaan yang dilakukan. Data sekunder diharapkan bisa diperoleh dari instansi-instansi terkait baik teknis maupun pemerintahan.



Gambar 1. Skema alur pikir pengkajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Eksplorasi Berbagai Jenis Program Perkreditan

#### Lumajang

Hampir di setiap dusun dapat ditemukan sistem ijon. Sistem tersebut umumnya dijalankan oleh penduduk desa yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang pisang. Pedagang membeli pisang petani saat masih di pertanaman (belum waktunya panen), dengan harga yang sangat murah (kurang dari 50% dari harga panen), sehingga pada saat buah pisang siap dipanen, buah tersebut sudah menjadi milik pedagang. Sistem tersebut memberikan konsekuensi, yaitu petani berkurang pendapatannya dan adanya kecenderungan untuk mengabaikan tanaman/lahan pertaniannya.

Bantuan pembiayaan pertanian semuanya berbentuk program dan penggunaannya dibatasi hanya untuk komoditas-komoditas tertentu dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan, PIDRA/LSM dan Pemkab

Permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan bantuan pembiayaan usaha antara lain adalah :

1. Umumnya, masyarakat memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif (membiayai anak sekolah, sakit, membeli barang dan keperluan sehari-hari). Masyarakat kesulitan mendapatkan uang tunai dari mata pencahariannya, atau uang tunai yang diperoleh dirasakan terlalu kecil
2. Jenis usaha di desa yang layak dapat dibiayai dengan kredit umum sangat terbatas, yang diperparah dengan infrastruktur yang kurang mendukung (jalan makadam dan belum ada listrik) dan jarak dengan ibu kota kabupaten cukup jauh (30 km)
3. Walaupun usaha dagang merupakan usaha yang cukup menjanjikan, tetapi tidak semua orang mempunyai bakat berdagang, sehingga peluang usaha dagang tidak dapat dimanfaatkan oleh setiap orang
4. Dengan sistem yang ada saat ini, sub sektor pertanian di desa kurang responsif terhadap kebutuhan modal usaha (kebun terdiri dari berbagai macam tanaman tahunan, jarak rapat tidak teratur, produktivitas rendah, dll.). Bahkan pihak perbankan menilai mereka tidak layak bank (*not bankable*)

#### Bojonegoro

Kelembagaan formal dan non formal yang ada di Desa Sidodadi antara lain terdiri dari KUD, Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) "Sidodadi", Kelompok Tani "Sumber Makmur" dan "Makmur Jaya", Proyek Pengembangan Pertanian Terpadu (P3T), Kelompok Tahlilan/Arisan, Kios Saprotan, dan beberapa pelepas uang. Masing-masing kelembagaan mempunyai fungsi dan peran khusus dengan tingkat keaktifan dan pengaruh yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat desa pada umumnya.

Kelembagaan permodalan dan penyediaan dana untuk masyarakat baik untuk ushatani maupun untuk kegiatan *off farm* di Desa Sidodadi : Bank harian (*Thithil*), Pelepas uang, Simpan Pinjam Tk RT, Kredit PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu), Kredit Usaha Mandiri (KUM), TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam), Kredit Saprotan (perorangan/kelompok), Kredit Arisan/PKK dan Pra Koperasi, sedangkan

yang ada di luar desa adalah : Koperasi Mitra Usaha Bojonegoro, KUD Kapas, BRI dan Bank Jatim.

### **Persepsi masyarakat terhadap program perkreditan yang ada**

1. Masyarakat menganggap bahwa skim-skim yang ada saat ini di daerah mereka relatif mudah diakses, bisa memenuhi kebutuhan yang mendesak terutama yang berkaitan dengan kebutuhan primer.
2. Mereka merasa bahwa bunga yang diterapkan terlalu tinggi. Namun, karena kredit (hutang) adalah sesuatu yang harus dibayar, maka mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikannya.
3. Masyarakat pada umumnya merasa bahwa pinjaman yang berasal dari bantuan pemerintah kurang mendidik, karena mereka mengetahui bahwa banyak terjadi penunggakan pinjaman seperti yang mereka lihat di media-media massa.
4. Jumlah pinjaman masih dirasakan terlalu rendah.
5. Bebarap program direspons positif oleh masyarakat, terbukti sampai saat ini masih ada program-program yang berjalan. Walaupun demikian, anggota masyarakat di dusun lain merasa ditinggalkan.
6. Animo masyarakat pedesaan yang masih rendah dalam perkreditan sesungguhnya karena belum memiliki kegiatan usaha/ekonomi yang menguntungkan secara ekonomis.
7. Keharusan adanya agunan bagi masyarakat pedesaan merupakan permasalahan yang sulit dipenuhi.
8. Pada umumnya masyarakat masih belum tahu/kenal dengan sistem syariah terutama pemahaman tentang sistem bagi hasil dan biaya-biaya lainnya yang dinilai seperti bunga.

### **Usulan Skim Kredit Masyarakat**

#### *Lumajang*

Dari hasil wawancara secara perorangan dan dari *focused group discussion* yang telah dilakukan, maka skim kredit yang dikehendaki antara lain sebagai berikut :

1. Prosedur yang harus ditempuh sederhana
2. Dapat dicairkan di tingkat desa.
3. Nasabah harus selektif, tidak semua orang bisa mendapat kredit
4. Bunga lunak dibawah 1.5% per bulan
5. Waktu Pinjaman kredit antara 1 tahun sampai 5 tahun
6. Skim kredit dapat digunakan selain untuk usaha juga untuk keperluan konsumtif/lainnya
7. Besarnya skim kredit per orang antara Rp 50,000,- sampai Rp 700,000,-
8. Sanksi dan aturan seyogyanya dapat dimusyawarahkan dengan masyarakat
9. Skim kredit tidak harus selalu dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk ternak, sembako atau kebutuhan lainnya
10. Agunan yang dapat dijamin antara lain adalah : surat motor/STNK, surat tanah, ternak dan hasil panen tanaman.

### Bojonegoro

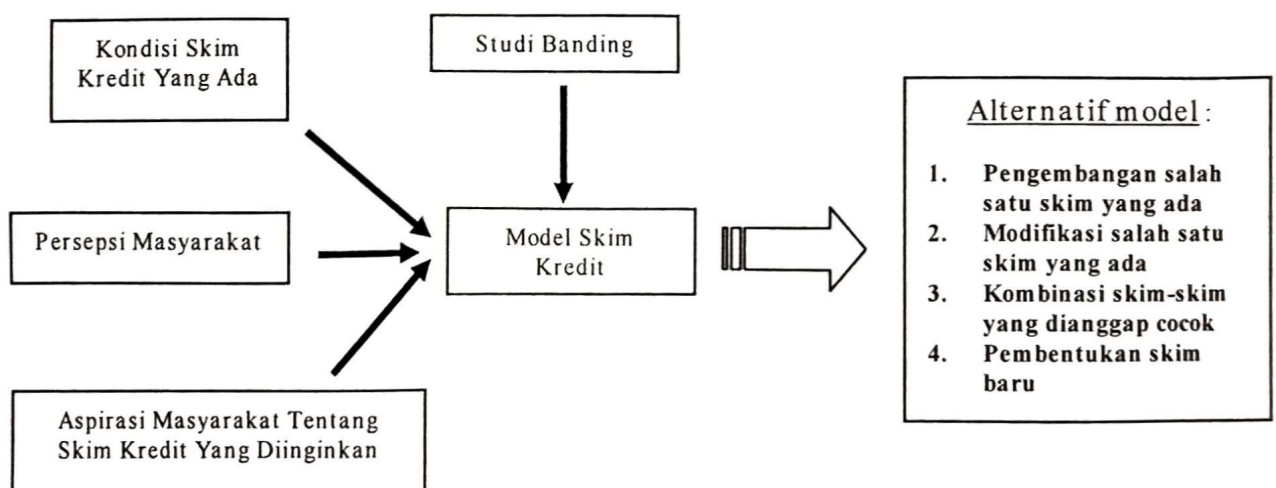
Dari hasil wawancara secara perorangan dan dari *focused group discussion* yang telah dilakukan, maka skim kredit yang dikehendaki antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan dana bantuan kredit untuk usahatani hendaknya dalam bentuk uang dan saprotan. Dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan usahatani yang bersifat biaya tunai seperti tenaga kerja.
2. Jangka waktu pinjaman untuk usahatani adalah 2 sampai 4 bulan dengan jumlah pinjaman minimal Rp.2 juta untuk luas lahan sawah (padi) 0,25 ha.
3. Bunga maksimal 2.5% per bulan dengan masa tenggang 2 minggu sampai 1 bulan.
4. Frekuensi pengembalian satu kali (*yarnen*)

### Pembentukan Model LKM di Lokasi Primatani

Keberlanjutan sebuah skim kredit sangat erat kaitannya dengan kelembagaan khususnya dalam hal aturan main terutama yang menyangkut prosedur seleksi, sistem insentif dan yang berkaitan dengan penegakan aturan itu sendiri (Syukur, 2002a). Ketiga aspek tersebut sangat menentukan apakah sebuah skim kredit bisa mencapai sasaran kredit dengan benar sehingga dapat menjamin tercapainya viabilitas finansial yang merupakan komponen penting untuk mencapai keberlanjutan skim kredit tersebut.

Pembentukan skimkredit atau model LKM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan dilakukan berdasarkan kondisi skim kredit yang ada saat ini, yang pernah ada di waktu-waktu sebelumnya dan persepsi masyarakat tentang skim yang ada serta harapan mereka tentang skim yang sesuai. Secara skematik, pembentukan tersebut bisa terlihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Skema pembentukan model LKM yang diusulkan dalam kegiatan Primatani baik di Lumajang maupun Bojonegoro.

Hasil pengamatan kelembagaan keuangan di Kawasan Primatani Lumajang memperlihatkan bahwa skim kredit yang ada di daerah tersebut pada umumnya sangat terbatas baik jenis maupun jumlah sarannya (nasabahnya) sehingga seringkali menimbulkan kecemburuan sosial yang harus dihindari. Oleh karena itu, untuk daerah seperti ini perlu diintroduksikan skim kredit baru yang sebaiknya menggunakan pendekatan *Grameen Bank*. Hasil studi banding di LPP-UMKM Kecamatan Sukadiri Tangerang dan Karya Usaha Mandiri Kecamatan Leuwiliang Bogor yang merupakan replikasi *Grameen Bank* memperlihatkan keunggulan pendekatan ini. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam pendekatan ini adalah aspek kelembagaannya karena dibentuk berdasarkan keinginan masyarakat bawah (pedesaan) dan seleksi ketat keanggotaannya (peneliti/teknisi BPTP Jatim hanya sebagai motivator). Proses seleksi tersebut menghasilkan anggota lembaga keuangan yang jujur dan bertanggung-jawab yang oleh Pranaji (2003) disebut sebagai salah satu elemen sosial yang sangat penting untuk keberlanjutan sebuah lembaga baik formal maupun informal.

Pada dasarnya, pendekatan *Grameen Bank* yang direplikasi oleh BPTP dalam pengkajian pengembangan LKM ini mempunyai prinsip dasar sebagai berikut:

1. Secara khusus ditujukan kepada kelompok masyarakat produktif pelaku usaha mikro dan kecil
2. Tidak memerlukan kolateral (agunan)
3. Nasabah tidak perlu datang ke lembaga keuangan, sebaliknya lembaga keuangan yang akan mendatangi nasabah
4. Penerapan bunga mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku di pasar keuangan
5. Metoda pembayaran angsuran (pokok dan bunga) dilakukan secara mingguan dalam jumlah kecil
6. Setiap nasabah tergabung dalam kelompok yang setara dan saling mendukung
7. Supervisi kegiatan bagi para peminjam
8. Tabungan wajib mingguan bagi setiap nasabah
9. Disiplin kredit yang ketat dan berlaku untuk semua nasabah
10. Transparansi; semua transaksi dilakukan secara terbuka pada pertemuan mingguan

Oleh karena keberadaan LKM adalah untuk mendukung Program Prima Tani, maka implementasi LKM dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya yaitu mempercepat transfer teknologi pertanian kepada pengguna, khususnya petani di pedesaan dalam bentuk pemberian pelayanan teknologi kepada nasabah bersamaan dengan kegiatan rutin mingguan anggota/nasabah yang semuanya diharapkan adalah para istri petani atau petani itu sendiri.

Selanjutnya, implementasi LKM di Kawasan Primatani meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu:

1. Pertemuan Umum yang tujuan umumnya adalah untuk mensosialisasikan LKM kepada publik (Pemda dan dinas-dinas jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, dan masyarakat petani yang berminat)
2. Uji Kelayakan Calon Anggota dilakukan kepada mereka yang berminat untuk berpartisipasi menjadi anggota LKM (layak dibantu dan mampu mengembalikan pinjaman)

3. Pembentukan Kumpulan atau Kelompok Kecil (KK) yang terdiri dari 5 anggota yang setara (secara sosial dan ekonomi) dan diharapkan bisa kompak serta bisa saling membantu dalam menghadapi permasalahan.
4. Latihan Wajib Kumpulan (LWK) bagi calon-calon anggota untuk memberikan pemahaman tentang LKM dan prosedur/mekanisme pinjaman dari skim-skim kredit yang akan diterapkan.
5. Ujian Pengesahan Kumpulan untuk mengetahui tingkat pemahaman calon anggota setelah mengikuti LWK.
6. Pembentukan Rembug Pusat yang merupakan gabungan dari beberapa KK (minimal 2 dan maksimal 6) dan penentuan waktu pertemuan mingguan.
7. Pengelolaan Organisasi dilakukan setelah implementasi LKM siap dilaksanakan (ada *seed capital*, anggota dan petugas pelaksana).

Sampai dengan akhir 2005, uji kelayakan yang dilakukan di Bojonegoro telah dilakukan terhadap 25 orang ibu-ibu di Dusun Kedungpapak memperlihatkan bahwa semua calon tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan anggota dan dikelompokkan masing-masing 5 (lima) orang untuk setiap kelompok yang disebut Kelompok Kecil (KK). Untuk Lumajang, telah terjaring sekitar 20 orang ibu-ibu di dusun Plambang dan juga sudah diuji kelayakannya. Pembentukan KK ini juga diserahkan kepada masing-masing calon anggota untuk membentuk sendiri-sendiri tanpa intervensi orang luar (termasuk tim LKM). Dengan demikian, di masing-masing Kawasan Prima Tani sudah ada cikal bakal LKM yang nantinya akan terus dikembangkan.

Dampak yang diharapkan terjadi dari hasil pembinaan kelompok selama proses inisiasi implementasi LKM di dua lokasi Primatani (Lumajang dan Bojonegoro) adalah makin kuatnya kelembagaan masyarakat/petani yang pada gilirannya akan memudahkan adopsi teknologi usahatani dan pengelolaannya baik yang bersifat *on-farm* maupun *off-farm*. Selain itu, keberadaan LKM sebagai lembaga finansial di pedesaan juga bisa mempercepat pertumbuhan lembaga-lembaga lainnya di pedesaan menuju kepada terciptanya jaringan kelembagaan Agribisnis Industrial Pertanian (AIP) yang merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan Prima Tani.

### Skim Kredit

Berdasarkan hasil pengamatan lapang, studi banding dan rekomendasi Tim Pakar Prima Tani, LKM Prima Tani meluncurkan 2 (dua) macam Skim Kredit yaitu Skim I dan Skim II dengan rincian skim sebagai berikut :

#### SKIM I :

- Penggunaan kredit : Kegiatan *off-farm* dan *on-farm*
- Pinjaman pertama : Maksimum Rp.300.000,- per anggota
- Durasi pinjaman : 6 bulan (25 minggu)
- Masa tenggat : 1 (satu) minggu
- Basis pembayaran : Mingguan (pokok pinjaman + bunga)
- Bunga (biaya adm.): 30% per tahun atau 2,5% per minggu
- Tabungan :
  - Tabungan wajib LWK (sekali selama menjadi anggota)
  - Tabungan wajib 5% dari pinjaman (setiap kali pinjaman)
  - Tabungan wajib mingguan (minimal Rp.500,- atau sesuai kesepakatan anggota (di tingkat RP)
  - Tabungan sukarela.

## SKIM II :

- Penggunaan kredit : kegiatan *on-farm*
- Pinjaman pertama : Maksimum Rp.300.000,- per anggota
- Durasi pinjaman : 4 bulan (17 minggu)
- Masa tenggat : 1 (satu) minggu
- Basis pembayaran : mingguan (50% pokok pinjaman + bunga) 50% sisa pokok pinjaman dibayarkan setelah panen
- Bunga (biaya adm.) : 30% per tahun atau 2,5% per minggu
- Tabungan :
  - Tabungan wajib LWK (sekali selama menjadi anggota)
  - Tabungan wajib 5% dari pinjaman (setiap kali pinjaman)
  - Tabungan wajib mingguan (minimal Rp.500,- atau sesuai kesepakatan anggota (di tingkat RP)
  - Tabungan sukarela.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan :

- Pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa kelembagaan petani dan masyarakat pedesaan di lokasi Primatani Renovasi (Bojonegoro) secara umum lebih tertata dan aktif dibandingkan yang ada di lokasi Primatani Introduksi (Lumajang). Hal ini diduga berkaitan dengan intensitas implementasi program-program pembangunan (pemerintah) yang ada sebelumnya.
- Ada 4 (empat) alternatif model pengembangan LKM yang bisa ditawarkan dan masih memerlukan kajian lebih lanjut yaitu : 1) Pengembangan salah satu skim yang ada, 2) Modifikasi salah satu skim yang ada, 3) Kombinasi skim-skim yang dianggap cocok, dan 4) Pembentukan skim baru.
- Telah terbentuk cikal bakal LKM sebagai hasil dari inisiasi implementasi LKM Agro baik di Bojonegoro maupun Lumajang melalui pendekatan *Grameen Bank* yang dikombinasikan dengan skim kredit usahatani.

### Saran :

- Diperlukan ketepatan dan kecepatan waktu dalam penyediaan dana *seed capital* sehingga calon nasabah tidak terlalu lama menunggu yang dikhawatirkan bisa merubah pikiran yang sudah terbentuk selama proses persiapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, 2003. Permasalahan dan Tantangan Sektor Pertanian di Indonesia. Pusat Pembiayaan Pertanian Deptan.
- Budiantoro, S., 2005. Difficulties Of Building Microfinance. Artikel - Ekonomi Rakyat Dan Keuangan Mikro - Januari 2005. Jurnal Ekonomi Rakyat ([www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)).

- Ismawan, Bambang, 2003a. Merajut Kebersamaan Dan Kemandirian Bangsa Melalui Keuangan Mikro, Untuk Menanggulangi Kemiskinan Dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat. Artikel - Th. II - No. 6 - September 2003. *Jurnal Ekonomi Rakyat* ([www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)).
- Ismawan, Bambang, 2003b. Pengalaman Lembaga Swadaya Dalam Menanggulangi Kemiskinan *Dalam Syukur et al., 2003 (Eds)*. Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. Pusat Inovasi Bisnis Indonesia, Bogor.
- Kurniadi, Titus K., 2002. Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Cara Efektif Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat. Artikel - Th. I - No. 5 - Juli 2002. *Jurnal Ekonomi Rakyat* ([www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)).
- Pranaji, Tri, 2003. Menuju Transformasi Kelembagaan Dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Puslitbang Sosek Pertanian. Balitbang Pertanian. Jakarta.
- Soentoro, Supriyati dan Erizal J., 1992. Sejarah Prekreditasi Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan *Dalam Taryoto et al., 1992 (Eds)*. Perkembangan Perkreditasi Pertanian di Indonesia. Monograph Series No.3. Puslit Sosek Pertanian, Bogor.
- Syukur, Mat, 2003a. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Keuangan Mikro *Dalam Syukur et al., 2003 (Eds)*. Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. Pusat Inovasi Bisnis Indonesia, Bogor.
- Syukur, Mat, 2003b. Membangun Lembaga Keuangan Mikro Agro Yang Lestari *Dalam Syukur et al., 2003 (Eds)*. Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. Pusat Inovasi Bisnis Indonesia, Bogor.
- Syukur, Mat, 2004. Access to Farm Credit by Small Scale Farmers in Indonesia *Dalam FFTC-ASPAC/NACF International Seminar, 2004*. Farm Credit Issues in Asia, June 21-25, 2004, Seoul, Korea.
- Thohari, Endang S., 2003. Peningkatan Aksesibilitas Petani Terhadap Kredit Melalui Lembaga Keuangan Mikro *Dalam Syukur et al., 2003 (Eds)*. Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. Pusat Inovasi Bisnis Indonesia, Bogor.